

## PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA MENURUT PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMSOSTEK DAN HUKUM ISLAM

Robby Andreawan<sup>1</sup>, Ema Fathimah<sup>2</sup>, Legawan Isa<sup>3</sup>

### Abstrak

*Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan keselamatan kerja menurut Pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek dan bagaimana perlindungan keselamatan kerja dalam pendekatan normatif Islam. Penelitian ini termasuk ranah penelitian hukum karena sember kajian adalah undang-undang dan Hukum Islam tentang kenaga kerjaan, sedangkan jenis penelitian berupa studi kepustakaan dengan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang digunakan atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan buku-buku lainnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, sebagai bahan informasi akademis tentang konsep keselamatan kerja melalui pendekatan hukum positif dan hukum Islam. Simpulan penelitian ini ada dua poin. Pertama Perlindungan keselamatan kerja berdasarkan UU Nomor 3 tahun 1992 tentang jamsostek menjamin pekerja atas hak keselamatan keamanan dan orang-orang yang ada di lingkungan kerja. Kedua Sedangkan dalam hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan keselamatan kerja yakni untuk memperoleh kemaslahatan dengan memelihara Al-umur al-dlarruriyah, dan maqashid syari"ah sebagai perlindungan keselamatan duniawi dan ukhrawi baik bagi pengusaha dan tenaga kerja.*

**Kata Kunci:** Keselamatan Kerja, Jamsostek, Undang-Undang

### Abstract

*The focus of the study in this research is how to protect work safety according to Article 1 of Law No. 3 of 1992 concerning Social Security and how to protect work safety in an Islamic normative approach. This research belongs to the realm of legal research because one study is the law and Islamic law on employment, while the type of research is literature study with primary, secondary, and tertiary data sources. The data collection method used is literature study by collecting data used or information from various library sources in the*

<sup>1</sup> Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Email: [robbyandreawan\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:robbyandreawan_uin@radenfatah.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Email: [emafathimah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:emafathimah_uin@radenfatah.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Email: [legawanisa\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:legawanisa_uin@radenfatah.ac.id)

*form of related laws and regulations, journals, research results, articles, and other books. The purpose of this study is to contribute to scientific thinking, as material for academic information on the concept of work safety through positive legal approaches and Islamic law. The conclusion of this research is two points. First, the protection of work safety based on Law Number 3 of 1992 concerning Jamsostek guarantees workers the rights to safety and security of the people in the work environment. Second, while in Islamic law there are provisions that regulate the protection of work safety, namely to gain benefit by maintaining Al-aged al-dlaruriyah, and maqashid syari'ah as protection of worldly and ukhrawi safety for both employers and workers.*

**Keywords:** *Work Safety, Social Security, Law*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja.<sup>4</sup> Dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual<sup>5</sup>

Peningkatan produksi dan produktifitas kerja serta kelangsungan kegiatan usaha secara kesinambungan hanya dimungkinkan apabila telah terbentuk suatu hubungan kerja yang dinamis, harmonis, selaras, serasi, dan seimbang antara pengusaha dan pekerja sehingga tercipta ketenangan usaha dan ketenangan kerja sesuai asas hubungan industrial yang terbuka, transparan, dan komunikatif. Ketenangan usaha dan ketenangan pekerja hanya dapat dicapai apabila pengusaha dan pekerja dapat memahami dan menghayati hak dan kewajibannya masing-masing sehingga menumbuhkan rasa saling mengerti, saling menghargai, dan menghormati dengan tidak mengabaikan nilai-nilai rasionalitas.<sup>6</sup> Penyelenggara perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat, sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara.<sup>7</sup>

Berbagai tulisan di bidang ketenagakerjaan seringkali dijumpai adagium yang berbunyi “pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan.” Adagium ini tampaknya biasa saja, sepertinya tidak mempunyai makna, tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja/buruh dikatakan sebagai tulang

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsotek)

<sup>5</sup> M. Ali, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, (Bandung: IMTIMA, 2009), hlm. 255

<sup>6</sup> Dwikardana, *Sistem Hubungan Industrial Di Indonesia*, (Jakarta: Imperial, 2006), hlm. 77.

<sup>7</sup> <http://gudangmakalah.blogspot.com>. Di akses tanggal 19 Juli 2012.

punggung karena memang dia mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja atau buruh, perusahaan tersebut tidak dapat berjalan lancar dan tidak dapat pula berpartisipasi dalam pembangunan nasional.<sup>8</sup>

Pentingnya pekerja/buruh bagi perusahaan dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan pekerja/buruh agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin sehingga kewaspadaan dalam bekerja tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran tersebut merupakan program perlindungan kerja yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.<sup>9</sup>

Sasaran keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara. Tempat-tempat kerja yang demikian itu tersebar pada segenap kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, pekerjaan umum, jasa, dan lain-lain. Salah satu aspek penting sasaran keselamatan kerja, mengingat resiko bahayanya adalah penerapan teknologi mutakhir atau terbaru<sup>10</sup>

Peraturan keamanan kerja atau keselamatan kerja merupakan suatu usaha untuk melindungi pekerja dari bahaya yang timbul karena pekerjaan dan menciptakan kondisi kerja yang aman bagi pekerja.<sup>11</sup> Semua orang yang mempekerjakan orang lain dengan membayar upah, wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan. Ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut hak-hak lain pekerja selama hubungan kerja berlangsung sampai dengan berakhirnya hubungan kerja.<sup>12</sup>

Hubungan keselamatan kerja dengan Islam adalah sama-sama mengingatkan umat manusia agar senantiasa berperilaku (berpikir dan bertindak) yang aman dan sehat dalam bekerja di tempat kerja (di kantor, di pabrik, di tambang, dan di mana tempat kita bekerja). Dengan berperilaku aman dan sehat akan tercipta suatu kondisi atau lingkungan yang aman dan sehat akan membawa keuntungan bagi diri sendiri maupun perusahaan tempat kerja. Keselamatan kerja dalam Islam adalah usaha yang dilakukan manusia pada dirinya (*self control*), untuk menghindari bahaya pada saat bekerja.<sup>13</sup>

Pertumbuhan perekonomian di Negara Indonesia yang merupakan salah satu sisi dari aspek pembangunan adalah timbulnya perusahaan-perusahaan besa maupun kecil. Demikian juga dengan peralatan yang digunakan semakin canggih. Semakin canggihnya dan mutakhirnya peralatan mesin-mesin tersebut, semakin diperlukan tingkat keterampilan tenaga kerja untuk mengoperasikannya. Dampak dari penggunaan teknologi yang demikian, di

---

<sup>8</sup> Pasal 9 Ayat (1) Perda Nomor. 12 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

<sup>9</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 55.

<sup>10</sup> Indah Entjang, *"Ilmu Kesehatan Masyarakat"*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 158

<sup>11</sup> Budiono, Abdul Rakhman, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 227.

<sup>12</sup> Jehani, Libertus, *Hak-hak Pekerja bila di PHK*, (Tangerang: VisiMedia, 2006), hlm.2.

<sup>13</sup> Abu Zahrah, *"Membangun Masyarakat Islam"*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm.55

satusisimemberi kemudahan dalam produksi dan efisiensi kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi, akan tetapi di sisi lain dapat pula menimbulkan resiko kerja yang tinggi, baik karena bahaya di tenaga kerja atau buruh. Oleh karena itu, norma K3 merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya bahaya akan kecelakaan kerja<sup>14</sup>

Keselamatan kerja adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja dan orang yang ada di sekitar lingkungan kerja selalu dalam keadaan aman, selamat dan sehat.<sup>15</sup> Suatu pekerjaan baru akan memenuhi kelayakan bagi kemanusiaan, apabila perlindungan keselamatan kerja terjamin. Di Indonesia perlindungan kerja tersebut dijamin sesuai dengan pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor. 14 tahun 1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja yang berbunyi. "Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama".<sup>16</sup>

Undang-undang yang mengatur tentang K3 yang ditunjukan untuk melindungi tenaga kerja, baik selama aktif bekerja maupun non aktif (pensiun). Tapi masih banyak pihak yang berinteraksi dalam produksi belum sepenuhnya menaruh perhatian terhadap usaha-usaha keselamatan kerja yang ditetapkan Undang-Undang.<sup>17</sup> Untuk mencapai tujuan dari Undang-Undang keselamatan kerja tersebut, maka pelaksanaan dan pengawasan terhadap dipenuhinya syarat-syarat (K3) memerlukan keterlibatan semua pihak baik pemerintah, penguasa, atau pengurus perusahaan, tenaga kerja maupun masyarakat umum sesuai dengan fungsinya masing-masing.<sup>18</sup> Keterlibatan yang mempunyai peran serta besar untuk terselenggaranya jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) dengan sebaik-baiknya. Diantaranya adalah pengawasan terhadap ditaatinya kewajiban-kewajiban dalam hal jaminan sosial oleh pengusaha menjadi syarat mutlak berhasilnya program yang besar dalam bentuk partisipasi sosial maupun kontrol sosial yang dilaksanakan secara aktif.<sup>19</sup> tafsirkan sebagai kebebasan sesuka hati, tetapi suatu kebebasan yang diatur karena itu dengan sendirinya harus dibatasi. Kita dengan tegas-tegas membantu dan melindungi pihak yang lemah kedudukan ekonominya terhadap pihak yang kuat kedudukannya<sup>20</sup> Dengan diselenggarakannya program jaminan sosial secara nasional, dapat di ciptakan kegotong royongan antara pengusaha dengan tenaga kerja, antara yang kuat dan yang lemah, yang tuadan yang muda dan yang sehat dengan yang kurang sehat.

Demikian pula dalam Islam sangat memperhatikan kepentingan-kepentingan pengusaha dan buruh, juga usaha perlindungan buruh, juga hubungan

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek dan Sistem Pengupahannya, (Jakarta: Arini Jaya Abadi, 1992), hlm. 383

<sup>15</sup> Suma'mur P.K., "*Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*", (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1981), hlm. 2

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992, hlm. 383

<sup>18</sup> Suma'mur P.K., "*Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*". hlm. 185

<sup>19</sup> Suma'mur P.K., "*Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*". hlm. 383

<sup>20</sup> Imam Supomo, "*Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*", (Jakarta: PT Prdnya Paramita, 1981). Cet. Ke-4, hlm. 10.

jaminan sosial terhadap hukum Islam di jelaskan pada ayat Al- qur“an surat an-Nahl: 90 yang artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kamu kerabat dan Allah swt dari perbuatan keji, Kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS an-Nahl 16:90).*<sup>21</sup>

Dalam ayat ini ada tiga hal yang diperintahkan oleh Allah SWTsupaya dilakukan sepanjang waktu sebagai alamat dari taat kepada Tuhan. Allah menyebutkan bahwa Dia memerintahkan kepada hamba-hamba- Nya untuk berlaku adil, yakni dan seimbang. Dan Allah memerintahkan untuk berbuatkebajikan. Sehingga jangan sampai pengusaha mengabaikan hak dan kewajiban-kewajibannya terhadap buruh. Pada dasarnya masyarakat bercita-cita keadilan sosial, tidak mengenal adanya hak mutlak dari perseorangan yang tidak dapatdiatur dan karena itu dibatasi. Kebebasan dalam masyarakat tidak dapat di adil yaitu menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan mana yang benar, mengembalikan hak kepada yang punya dan jangan berlaku zalim atau aniaya.<sup>22</sup> Pandangan Islam, dua perkara pokok (jaminan keselamatan kerja dan upah) mendapat perhatian penting. Jaminan tersebut salah satunya terkandung dalam hadiś yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi Muhammad SAW bersabda *“Para pekerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka, barang siapa mempunyai pekerja, hendaklah pekerja itu diberi makanan sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan dipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu”*(HR. Imam Ahmad).

Berdasarkan konsep hadis di atas Islam berusaha meletakkan hubungan pekerja bukan sekadar relasi atas bawah, tapi sejajar dan lebih manusiawi. Begitu juga jaminan sosial tenaga kerja dalam Islam memerintahkan kepada pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Sebab para pekerja itu merupakan bagian dari perusahaan dan kalau bukan susah payah pekerja tidak mungkin usaha majikan (pengusaha) dapat berhasil baik. Dengan kata lain antara pekerja dan pengusaha memiliki andil yang besar untuk kesuksesan usaha majikan. Maka majikan atau pengusaha berkewajiban untuk mensejahterakan pekerja dan memenuhi hak-haknya, termasuk memberikan upah yang layak dan jaminan sosialnya.<sup>23</sup>

Dari pemaparan di atas dapatdiperoleh kesimpulan bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan Hukum Islam sangat memperhatikan keselamatan kerja. Maka peneliti ingin meneliti lebih dalam keselamatan kerja menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 3 Tahun 1992 dan hukum Islam dengan judul *“Perlindungan Keselamatan Kerja Menurut Pasal 1Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek Dan HukumIslam”*

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang, Toha Putra, 1997) hlm.

<sup>22</sup>Hamka. *“Tafsir Al-Azhar”* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm.283

<sup>23</sup>Suharwardi K. Lubis, *“Hukum Ekonomi Islam”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 157

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah Bagaimana perlindungan keselamatan kerja menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek? Bagaimana perlindungan keselamatan kerja menurut hukum Islam?

## C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Bagaimana konsep perlindungan keselamatan kerja menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek dan Bagaimana perlindungan keselamatan kerja menurut hukum Islam? Selain dari halterebut penelitian ini juga untuk memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, sebagai bahan informasi akademis tentang konsep keselamatan kerja melalui pendekatan hukum posetif dan hukum Islam.

## D. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan

Ditinjau dari jenis data yang digunakan Pendekatan penelitaian ini adalah pendekatan kualitatif, karena pendekatan kualitatif lebih tepat untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian

### 2. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dengan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang digunakan atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan buku-buku lainnya.

### 3. Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisa bahan hukum tersebut adalah deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kemudian diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasi sesuai dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian
- b. Hasil klasifikasi bahan kemudian selanjudnya disusun secara sistematis
- c. Bahan hukum yang telah sistematis tersebut kemudian ditelaah untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan kesimpulan

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Keselamatan Kerja Menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1992 TentangJamsostek

Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerima penghasilan yang hilang.

Disamping itu, program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antara lain:

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.

Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat Indonesia, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor informal.<sup>24</sup> Mengenai peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional saat ini, semakin meningkat seiring dengan laju perkembangan nasional karena semakin besar pula tantangan yang dihadapi sebagai akibat dari semakin meningkat teknologi yang modern diberbagai sektor kegiatan usaha yang mengancam kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja.<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek Pasal 1 ayat 1, ayat 2, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, dan ayat 9. Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.
4. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
5. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

<sup>24</sup> Abdul Rahman Budiono, SH. M.H. *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, cet ke-3, hlm 97

<sup>25</sup> Tim Jaminan Sosial Tenaga Kerja, (Jakarta: PT Jamsosotek. 1999), hlm. 3

6. Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
7. Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, atau perawatan.
8. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.<sup>26</sup>

Dalam pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

1. keselamatan dan kesehatan kerja
2. moral dan kesusilaan, dan
3. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan perlindungan keselamatan kerja, maka pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan. Dalam pengertian pembinaan norma ini sudah mencakup pengertian pembentukan, penerapan dan pengawasan norma itu sendiri.

Keselamatan kerja bertalian erat dengan kecelakaan kerja yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri. Kecelakaan industri ini secara umum dapat diartikan suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas. Suatu kejadian atau peristiwa tertentu adalah sebab musababnya demikian pula kecelakaan industri/kecelakaan kerja ini, di mana ada 4 (empat) faktor penyebabnya yaitu:<sup>27</sup>

1. Faktor manusianya, misalnya karena kurangnya keterampilan atau kurangnya pengetahuan, salah penempatannya. Misalnya si tenaga kerja lulusan Sekolah Teknologi Menengah (STM) akan tetapi ditempatkan di bagian tatausaha.
2. Faktor materialnya/bahannya/peralatannya, misalnya bahan yang seharusnya terbuat dari besi, akan tetapi supaya lebih mudah dibuat dari bahan lainnya sehingga dengan mudah dapat menimbulkan kecelakaan.
3. Faktor bahaya/sumber bahaya, ada dua sebab yaitu:
  - a. Perbuatan berbahaya, misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan/kelesuan, sikap kerja yang tidak sempurna dan sebagainya.
  - b. Kondisi/Keadaan berbahaya yaitu keadaan yang tidak aman dari mesin, peralatan-peralatan, lingkungan, proses dan sifat pekerjaan.
4. Faktor yang dihadapi, misal kurangnya pemeliharaan/perawatan mesin

<sup>26</sup> Pasal 1 undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jamsostek

<sup>27</sup> Asri Wijayanti "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Indonesia" Jakarta: PT. Bina aksara 2003, hlm 132.



mesin/peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.

Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam undang-undang ini meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja. Kecelakaan Kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik ataupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha, sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% -1,74% sesuai kelompok jenis usaha. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit akibat hubungannya.

Jaminan Kematian Pekerja/buruh yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun dalam bentuk santunan berupa uang. Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja yang menjadi peserta Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran program jaminan kematian sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp. 6 Juta terdiri dari Rp.5 Juta santunan kematian dan Rp.1 Juta uang pemakaman. Jaminan Hari Tua Hari Tua dapat mengakibatkan terputusnya upah pekerja/buruh karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi pekerja/buruh dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat pekerja/buruh mencapai usia lima puluh lima tahun atau memenuhi persyaratan tertentu.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pemeliharaan Kesehatan adalah Hak Tenaga Kerja (JPK) adalah salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit dan kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh dan pengobatan secara efektif dan efisien. Perlindungan sosial mengandung berbagai unsur yaitu bantuan sosial, asuransi sosial, dan juga program-program bantuan dan kesejahteraan lainnya. Dalam ruang lingkup yang luas tersebut, perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran, serta kemiskinan pada umumnya. Jaminan sosial dapat dibedakan antara beberapa jenis sebagai berikut:

1. Asuransi sosial, yang menggunakan sistem asuransi untuk menghadapi risiko sakit, kecelakaan, kematian.
2. Tabungan hari tua, yang menggunakan sistem tabungan untuk pemupukan

dana hari tua.

3. Tanggung jawab pemberi kerja yang memberikan kewajiban pada pemberi kerja untuk bertanggung jawab atas kecelakaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang menimpapekerjaanya.<sup>28</sup>

Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan dalam undang-undang ini sebagai pelaksanaan Pasal 10 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Akan tetapi mengingat objek yang mendapat jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam undang-undang ini diprioritaskan bagi tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, perorangan dengan menerima upah maka kepada tenaga kerja di luar hubungan kerja atau dengan kata lain tidak bekerja pada perusahaan, pengaturan tentang jaminan sosial tenaganya akan diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah. Adapun ruang lingkup yang diatur di dalam undang-undang ini meliputi:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja
2. Jaminan Kematian
3. Jaminan Hari Tua
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Mengingat jaminan sosial tenaga kerja merupakan program lintas sektoral yang saling mempengaruhi dengan usaha peningkatan kesejahteraan sosial lainnya, maka program jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan secara bertahap dan saling menunjang dengan usaha-usaha pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan, kesempatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>29</sup>

Pengawasan terhadap undang-undang ini, dan peraturan pelaksanaannya dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Guna melindungi hak pekerja maka demi terciptanya produktifitas kerja, sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Keselamatan Kerja maka pengusaha atau perusahaan diwajibkan:

1. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja.
2. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

<sup>28</sup> Santaneo Kertanegoro, "Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (Sistem dan Program Jaminan Sosial di Negara-negara ASEAN)", (Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 1998), hlm. 1-5

<sup>29</sup> Imam, Supomo, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, Jakarta: PT Prdnya Paramita, 1981. Cet. Ke-4. Hlm 88

3. Menyediakan secara cuma- cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk- petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.<sup>30</sup>

Jadi keselamatan kerja yang termuat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) sebagai hukum positif, yaitu secara material sudah cukup untuk menjamin pekerja atas hak keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan para pekerja serta orang- orang yang ada di lingkungan kerja.

## **B. Perlindungan Keselamatan Kerja Menurut Hukum Islam**

Konsep perlindungan tenaga kerja menurut hukum Islam lebih mengedepankan aspek humanisme. Terlihat bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memilih pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Tentu saja dengan memilih pekerjaannya, seorang pekerja akan bekerja secara profesional. Profesionalisme dalam hukum Islam dijadikan sebagai bagian hak juga sekaligus kewajiban tenagakerja. Profesionalisme ini dapat diukur dari kinerja seorang tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dari hasil pengukuran ini, pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar upah sesuai dengan kinerja dan tanggung jawabpekerjaannya.

Perlindungan keselamatan dalam Islam tidak hanya terbatas pada keselamatan raga semata, tetapi juga mengatur keselamatan tenaga kerja dalam hal-hal yang bersifat abstrak seperti kesehatan akal, jiwa dan agama, dalam hukum positif, tidak ada pasal yang mengatur keselamatan beragama. Keselamatan beragama berarti bahwa pengusaha harus memberikan kebebasan beragama kepada tenaga kerja tanpa ada upaya untuk mempengaruhi berpindah kepada agama lain.<sup>31</sup>

Hukum Islam merupakan konsep yang selalumengikuti perubahan sosial. Segala permasalahan yang ada dalam kehidupan sosial akan berujung pangkal dari sebuah aturan dalam Islam.<sup>32</sup> Apalagi persaingan antar umat beragama yang sudah ada sejak zaman para nabi, hanya saja pengelompokan di masa nabi-nabi terbagi dalam dua bagian yaitu mu"min dan kafir.

Menurut catatan sejarah kenabian bahwa kaum-kaum kafir selalu memaksa dan melakukan tindak kekerasan serta pemaksaan untuk memeluk agamanya, hal inilah yang pada akhirnya muncul perlindungan beragama terhadap tenaga kerja.<sup>33</sup> Salah satu wujudnya perlindungan beragama di Indonesia adalah pengurangan jam kerja di bulan ramadhan dan libur pada setiap hari besar setiap agama. Hukum Islam juga mengatur keselamatanjiwa tenaga kerja. Bentuk perlindungan ini tidak tertuang dalam hukum positif.

<sup>30</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Keselamatan Kerja

<sup>31</sup> Muhammad Abdul Mannan , *"Teori dan Praktek Ekonomi Islam"*, (Yogyakarta: dhana Bakti wakaf, 1993), hlm. 89

<sup>32</sup> Paisol Burlian," *Hukum Tata Negara*", (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2018, hlm 140

<sup>33</sup> H. Ahmad Gazali, *"menuju Masyarakat Industri Yang Islami"*, (Jakarta: Dwi Cahya, 1995), Cet. ke-1, Hlm.8

Hukum positif hanya mengatur jaminan yang bersifat fisik, sementara hukum Islam mengatur baik fisik maupun jaminan non-fisik. Pada dasarnya keselamatan jiwa yang dijamin oleh pihak pengusaha adalah bertujuan untuk menciptakan stabilitas pekerjaan. Ketika tenaga kerja selamat dari ancaman bahaya, maka akan tercipta stabilitas iklim profesionalisme tenaga kerja dan menghasilkan pekerjaan yang baik. Aturan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk memberatkan pengusaha, justru jika dilihat dari kacamata sosial-ekonomi, hukum ini sangat menguntungkan kedua-belah pihak, hubungan yang mutualisme ini akan menciptakan tali persaudaraan antara pengusaha dan pekerja, hubungan ini diperlukan karena manusia merupakan individu bagian dari masyarakat yang luas.<sup>34</sup>

Manusia tidak pernah lepas dari kebutuhan-kebutuhan dasarnya, pengusaha harus memperlakukan tenaga kerja sebagai manusia seutuhnya. Dengan demikian, keselamatan aspek-aspek yang lain seperti keluarga dan keturunannya dapat terjamin. Jika saja seorang tenaga kerja yang sedang hamil dipaksakan untuk melakukan pekerjaan yang berat, maka akan mengakibatkan gugurnya kandungan. Baik dalam hukum positif maupun hukum Islam secara tegas bahwa perusahaan atau pihak yang memberi pekerjaan berkewajiban memberikan cuti hamil sampai kondisi tenaga kerja itu pulih seperti semula.

Substansi hukum Islam sebenarnya mengatur tata kehidupan ketenagakerjaan secara global, sehingga apapun yang terkait dalam persoalan tenaga kerja ini dapat dengan mudah ditemukan, tetapi memang dibutuhkan penafsiran yang tepat, keselamatan kerja adalah bagian dari jaminan perusahaan atau yang mempekerjakan buruh yang diberikan kepada tenaga kerja. Dalam hukum Islam disebutkan perlindungan keselamatan keluarga dan keturunan, misalnya, dapat diterjemahkan berbagai variasi seperti cuti haid, cuti hamil, kesejahteraan keluarga, tidak mempekerjakan anak di bawah umur produktif dan sebagainya.<sup>35</sup> Hubungan majikan dan buruh yang dibangun dalam Islam adalah menempatkan buruh sebagai manusia yang bermartabat (buruh diposisikan selayaknya saudara dan mitra kerja), majikan memperlakukan buruh sebagaimana memperlakukan dirinya sendiri, baik dalam hal kelayakan pakaian, makanan, maupun tempat tinggal dan majikan tidak boleh memberikan beban kerja kepada buruhnya diluarkemampuannya. Dalam hadits Abu Dzarr r.a, Nabi Muhammad SAW bersabda:

*“Janganlah kalian membebani mereka (budak), dan jika kalian memberikan tugas kepada mereka, bantulah mereka” (HR. Bukhari no. 30)*<sup>36</sup>

Beliau melarang memberikan beban tugas kepada pembantu melebihi kemampuannya. Jikapun terpaksa itu harus dilakukan, beliau perintahkan agar

<sup>34</sup> Ahamd Azhar Basyir, “Seputar Filsafat, Hukum, politik dan Ekonomi Islam dalam Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman”, (Bandung: Mizan, 1993), cet. ke-1, hlm. 191

<sup>35</sup> Muhammad Abdul Mannan, “Teori dan Praktek Ekonomi Islam”, (Yogyakarta: dhana Bakti wakaf, 1993), hlm. 69

<sup>36</sup> (HR. Bukhari nomor 30)

sang majikan turut membantunya. Dari Abdullah bin Umar r.a Nabi SAW bersabda:

*“Berikanlah upah pegawai (buruh), sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibn Majah dan dishahihkan al-Albani).*

Nabi juga mewajibkan para majikan untuk memberikan gaji pegawainya tepat waktu, tanpa dikurangi sedikit pun. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan lainnya:

*“tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”*

Dari Hadist ini dapat kita ketahui bahwa dharar (melakukan sesuatu yang membahayakan) dilarang di dalam syari‘at ini. Maka, tidak halal bagi seorang Muslim mengerjakan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan saudaranya sesama Muslim, baik berupa perkataan atau perbuatan, tanpa alasan yang benar. Dan semakin kuat larangan tersebut jika dharar itu dilakukan kepada orang-orang yang wajib dipergauli secara rihsan, seperti karib kerabat, isteri, tetangga, dan semisalnya. Di antara contoh Hadist ini adalah Seseorang dilarang menggunakan barang miliknya jika hal itu menimbulkan madharat (gangguan atau bahaya) kepada tetangganya. Meskipun ia mempunyai hak milik secara penuh terhadap barang tersebut, namun dalam pemanfaatannya haruslah diperhatikan supaya tidak memudharatkan, mengganggu, ataupun merugikan tetangganya.

Salah satu aspek memperlakukan buruh secara baik dalam paradigma Islam dengan memberikan hak dan kewajiban secara berimbang, baik dari sisi beban kerja maupun dengan hak upah yang diterimanya. Persamaan perlindungan keselamatan kerja menurut hukum positif dan hukum Islam terletak pada tujuan dan asas-asas jaminan sosial. Sedangkan perbedaannya terletak pada prinsip-prinsip jaminan sosial dan sasaran/target jaminan sosial. Jadi dalam hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang mengenai perlindungan keselamatan kerja yaitu merupakan keharusan abadi untuk memperoleh kemaslahatan dengan memelihara Al-umur al-dlaruriyah, dan maqashid syari‘ah sebagai perlindungan keselamatan duniawi dan ukhrawi baik bagi pengusaha dan tenaga kerja.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah kemukakan di atas, ada dua poin yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, antara lain:

1. Perlindungan keselamatan kerja yang termuat pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jamsostek sebagai hukum positif, secara material sudah cukup untuk menjamin pekerja atas hak keselamatan keamanan kerja serta orang-orang yang ada di lingkungan kerja.
2. Sedangkan dalam hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan keselamatan kerja yakni untuk memperoleh kemaslahatan dengan memelihara Al-umur al-dlaruriyah,

danmaqashid syari'ah sebagai perlindungan keselamatan duniawi dan ukhrawi baik bagi pengusaha dan tenaga kerja.

### 3. Saran

1. Untuk Menjamin kelancaran perekonomian di Indonesia pemerintah diharapkan dapat terus memberikan peraturan perundang-undangan yang adil dan relevan bagi masyarakat khususnya bagi pengusaha dan tenaga kerja tentunya tidak memberatkan kedua belah pihak.
2. Lembaga legislatif diharapkan dapat menjadi wadah yang dapat merealisasikan aspirasi masyarakat khususnya pengusaha dan tenaga kerja, sebab lembaga legislatif pada saat ini mempunyai peran yang sangat besar dan penting dalam menyampaikan aspirasi rakyat.
3. Dengan adanya jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) atau asuransi yang mengatur perlindungan keselamatan kerja diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan realisasi yang nyata.

### DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadist

Abdul khakim, *"Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU 13 Tahun 2003"*, (Bandung, PT Chitra Abadi Bhakti: 2003 )

Abu Zahrah, *"Membangun Masyarakat Islam"*., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994),

A.M. Sugeng Budiono *"Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja"* 2003 (Semarang: Badan Penerbit UNDIP)

Ali Mutahar, *Qamûs al-Mûtahar: Arab- Indonesia*. (Bandung: Mizan Media Utama. 2005).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2008).

Anonym, *Pengertian Syariah dan Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), cet. Ke-3,

Budiono, Abdul Rakhman, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997)

Dwikardana, *"Sistem Hubungan Industrial Di Indonesia"*, (Jakarta: Imperial, 2006),

Hamka. *"Tafsir Al-Azhar"* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983)

Imam Supomo, *"Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)"*, (Jakarta: PT Prdnya Paramita, 1981)

Izzuddin Khatib At-Tamimi, *"Bisnis Islam"*, (Jakarta: Fikahati aneska, 1995), Cet ke-2,

Jehani, Libertus, *Hak-hak Pekerja bila di PHK*, (Tangerang: VisiMedia, 2006)

Lalu husni, *"Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri Melalui Pengadilan dan Luar Pengadilan"* ( Rajwali pers, Jakarta 2004 )

M. Ali, *"Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional"*, (Bandung: IMTIMA, 2009),

Nandang Mulyasantoso, *"Tanya Jawab Pengantar Hukum perburuhan"*, (Bandung: Armico, 1981),

- Najati, U, M., (2000). Psikologi dalam Tinjauan Hadist Nabi *Shollallahu Alaihi Wasallam*. Mustaqim. Jakarta Selatan.
- Nurrohiem, I., (2015). *Bekerjalah untuk Duniamu, Jangan Lupa Akhiratmu*. Penerbit Safirah. Yogyakarta.
- Paisol Burlian,” *Hukum Tata Negara*”, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2018,
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987,
- Ridley, J., (2004). *Ikhtisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Suharwardi K. Lubis, “*Hukum Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Suma’mur P.K, “*Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*”, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1981)
- Syukri sahib, *Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. (Jakarta: Bima2001)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun1992 *Tentang Jaminan Sosial TenagaKerja*.
- Undang-Undang. No.3 tahun 1992 *tentang Jamsostek dan Sistem Pengupahannya*, (Jakarta: Arini Jaya Abadi, 1992)
- Undang-Undang No 3 tahun 1992.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Rajawali Pers,2008)
- <http://gudangmakalah.blogspot.com>. Diakses tanggal 9 Juli 2012.